

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mengenai implementasi kebijakan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengorganisasian yang dilakukan dalam implementasi E-Monev telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan sesuai dengan peraturan, baik di tingkat Bappeda Kabupaten Ciamis ataupun Organisasi Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, ketersediaan sumber daya fasilitas yang dimiliki telah mencukupi dan berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi sistem E-Monev di Kabupaten Ciamis. Adanya sumber daya fisik seperti *website* yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Kabupaten Ciamis berdampak pada kemampuan organisasi memfasilitasi pengelolaan server yang mandiri. Meskipun, terdapat tantangan pada jenis pekerjaan lain yang dikerjakan oleh operator atau admin pelaksana di tingkat OPD menyebabkan ketersediaan sumber daya manusia di tingkat OPD belum berjalan secara optimal. Akan tetapi, adanya manajemen pelaksanaan pelaporan pada sistem dan pengembangan aplikasi yang jelas menjadi pendorong implementasi E-Monev dalam optimalisasi ketersediaan data capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Kegiatan interpretasi kebijakan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan mendukung implementasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik. Adanya upaya sosialisasi dan pelatihan telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya penjelasan substansi sebuah kebijakan untuk mendorong pelaksanaan implementasi serta tercapainya tujuan kebijakan. Selain itu, adanya pedoman pelaksana sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik sebagai penjelasan kebijakan dalam bahasa teknis yang bersifat operasional menunjukkan bahwa ketersediaan media penjas kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan E-Monev di Kabupaten Ciamis telah terpenuhi dengan baik. Dengan adanya kegiatan interpretasi kebijakan tersebut, proses penggunaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik dapat mendorong tersedianya data capaian kinerja pembangunan di Daerah Kabupaten Ciamis melalui penggunaan E-Monev.
3. Kegiatan aplikasi atau penerapan kebijakan telah berjalan dalam pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik meskipun belum optimal. Kehadiran E-Monev telah berjalan menghasilkan *output* dengan baik melalui pengolahan data dalam sistem E-Monev secara singkat dan mudah dengan *output* yang dihasilkan sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Akan tetapi, pelaksanaan ketepatan pelaporan pada aspek waktu pelaporan belum berjalan optimal. Pada level operator atau admin OPD, pelaporan data capaian kinerja pembangunan masih mengalami kendala dengan

ditemukannya keterlambatan pengisian data capaian kinerja pembangunan. Keterlambatan yang terjadi diakibatkan banyaknya jenis pekerjaan lain yang dilakukan serta kompleksitas data yang dilaporkan. Hal tersebut mengakibatkan konsistensi dan komitmen waktu pelaporan pada sistem e-monev kurang berjalan dengan baik terhadap waktu pengisian data capaian kinerja pembangunan. Meskipun, pada kemampuan sumber daya dan kondisi lingkungan telah mendukung dalam implementasi E-Monev di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut ditandai dengan tingkat pemahaman dan sikap para admin yang kooperatif serta adanya peraturan yang jelas menjadi pendukung lingkungan untuk dapat mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka implikasi yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan komitmen oleh seluruh organisasi pemerintah daerah dalam penggunaan Aplikasi E-Monev sebagai fasilitas yang mempermudah pelaksanaan evaluasi dan monitoring.
2. Perlu adanya pemerataan dan pengkajian beban pekerjaan yang dimiliki oleh admin atau operator E-Monev pada tingkat organisasi pemerintah daerah untuk menentukan efektifitas kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya.